

**PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
*AUDIT FEE***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAHMADDIAN PRIMASARI

NIM. C2C008114

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

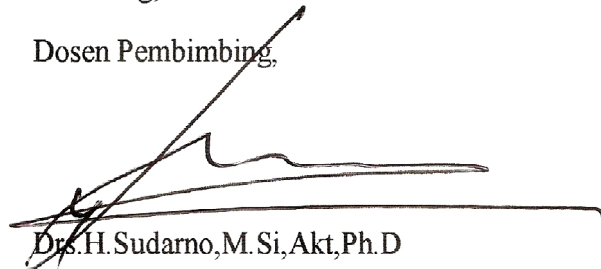
Nama Penyusun : Rahmaddian Primasari
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008114
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis\Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH KONEKSI POLITIK
DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *AUDIT FEE***

Dosen Pembimbing : Drs.H.Sudarno,M.Si,Akt,Ph.D

Semarang, 11 Januari 2013

Dosen Pembimbing,



Drs.H.Sudarno,M.Si,Akt,Ph.D

NIP. 19650520 1999001 1001

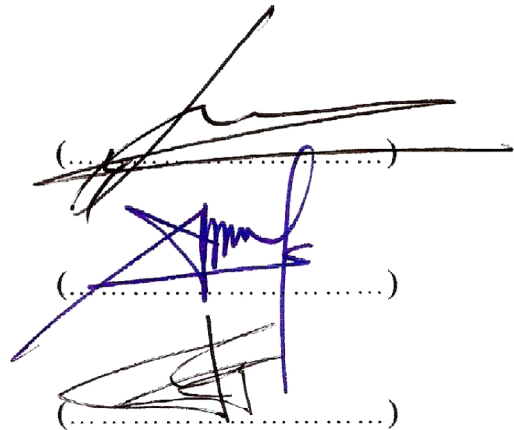
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

Nama Penyusun : Rahmaddian Primasari
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008114
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
AUDIT FEE**
Dosen Pembimbing : Drs.H.Sudarno,M.Si,Akt,Ph.D

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Februari 2013

Tim Penguji:

1. Drs.H.Sudarno,M.Si,Akt,Ph.D
2. Prof.Dr.H.Abdul Rohman,M.Si,Akt
3. Surya Raharja,SE,M.Si,Akt



(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahmaddian Primasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT FEE**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,

(Rahmaddian Primasari)

NIM : C2C008114

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Asy – Syarh : 5 – 8)

Jika ALLAH menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika ALLAH membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada ALLAH saja orang-orang mukmin bertawakal. (Ali – Imron:160)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?? (Ar – Rahman : 13)

Yakinlah bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi adalah yang terbaik (Prima)

PERSEMBAHAN

Skrripsi ini ku persembahkan untuk Mama dan Papa sebagai wujud bakti ku atas segala limpahan doa, kasih sayang dan pengorbanannya agar menjadi anak yang berbakti. Untuk mas adi dan ndutt dian tersayang yang telah memberi semangat dan dukungan.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of political connections and good corporate governance of the audit fee. Political connections interpreted with government-owned companies and the owner of a company is a politicians. The implementation of good corporate governance using rank CGPI.

This study is replication of research Wahab. Populations in this study is a company that follows survey exercised by IICG in the 2007-2011. This research using purpose sampling methods and the analysis used multiple regression.

The result of study indicates that the company which has political connections can influence positive and significant to audit fee. Second, good corporate governance can influence positive and significant to audit fee.

Keywords: agency theory, political connections, CGPI, audit fee

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap *audit fee*. Koneksi politik diinterpretasikan dengan perusahaan BUMN dan pemilik perusahaan merupakan politikus. Penerapan *good corporate governance* menggunakan peringkat CGPI.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahab. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survey yang dilaksanakan oleh IICG pada tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Hasil yang kedua adalah penerapan *good corporate governance* dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Kata kunci: agensi teori, koneksi politik, CGPI, *audit fee*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur atas segala limpahan rahmat dan berkah dari Nya, penulisan skripsi dengan judul ‘PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT FEE*’ telah diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si. Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas pengarahannya disaat penulisan skripsi.
3. Bapak H. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Acc. dan Bapak Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan tentang perkuliahan.
4. Bapak Drs. H. Sudarno, M.si, Akt., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan nasehat dengan penuh kesabaran dan bersedia

mencurahkan pikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt dan Bapak Surya Raharja, SE, M.Si, Akt sebagai dosen penguji yang telah membantu atas perbaikan skripsi ini.
6. Mama (Sri Hartini, B.Sc) atas doa, kasih sayang, dan nasihat yang telah diberikan.
7. Dek Dian yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan pengertian yang telah diberikan.
8. Mas Adi dan Mbak Ud yang selalu penulis repoti ketika menginap dirumahnya saat kangen rumah serta nasihat-nasihat yang telah diberikan.
9. Teman-teman Akuntansi'08 (Rini, Dian, Rifka, Rani, Ayu Martaning, Kiki, Firda, Mira, Tri Wahyuni, Zul, Tri Wulandari, Wulan, Sheren, Donny, Toni, Oki, Satsya Yoga, Rio, Indra) yang bersedia menjadi teman ngobrol, bercanda, saling memberikan artikel dan data-data untuk skripsi penulis serta saling memberi motivasi bersama penulis.
10. Teman penulis (Om Angga dan Ayu) yang telah membantu mencari data untuk kelengkapan penulisan skripsi.
11. Karyawan Pusat Informasi Pasar Modal Semarang yang telah memberi data untuk keperluan penulisan skripsi.
12. Dek Anggit, teman sekamar yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Bab II, dengan "*Bab dua Sus!!*" nya.

13. Teman-teman kost BP 26 (Dek fifin, Mbak Jul, Mbak Okh, Lia) yang bersedia dijadikan tempat berkeluh kesah, teman bercanda, dan selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teman-teman seperantauan IKAMAJATIM UNDIP (Dek Yoga, Mas Dinata, Dek Rudi, Dek Nisa, Dek Lala, Dek Fajri, Dek Ragil) terima kasih atas kebersamaannya di tempat perantauan.
15. Pendiri majelis dzikir Al Khidmah (KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi RA) terima kasih atas terbentuknya majelis dzikir ini sehingga penulis dan teman-teman Al Khidmah Kampus Semarang (Bang Aum, Bang Ipin, Mas Mukhlis, Mas Zaenal, Mas Haryo, Mas Gendon, Mas Zaenury, Mas Aab, Dek Iqbal, Ahdiat, Dek Titis, Dek Nurul, Dek Norma, Dek Laiq, Dek Ayu, dan Umar) bersemangat menggelar majelis dzikir bersama dalam rangka mendoakan orang tua, guru-guru kami dan para pemimpin di sela-sela kesibukan menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Diponegoro (Makrus, Asyhar, Eko, Syamsudin, Huda, Mbak Ira, Dyah, Uthe', Salimna, Kiki, Mbak Fida, Ida Bio, Iis, Dek Indra, Dek Ali dan Dek Syakiroh) terima kasih atas pergerakan yang ditularkan, dan semangat kebersamaan yang telah diberikan. *Tangan terkepal dan maju ke muka!*
17. Teman-teman TOSAR'HOLIC'08 (Reni, Yuni, Rizqi, Icha, Nikmah, Mbak Vivi, Susi, Lino, Zen, Febri, Nashih) terima kasih atas kebersamaan disaat berpetualang bersama alam.

18. Teman-teman KKN Desa Sidigede (Bang Ridho, Bagus, Adi, Pak Yo, Riki, Rizki, Mbak Nisa, Icha, Diani) terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah ditularkan.
19. Teman-teman kost Asput-Pleburan, Singsong, (Farida, Biba, Fenda, Mbak Astri, Mbak Ira, Icha, Mbak Nopek, Mbak Nurul, Fita, Della, Mbak Difa, Erlita) yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa, senyum dan kebahagiaan.
20. Grup ASPAL (Dilla, Riris, Prima, Yo'el) yang penulis juga tergabung di dalamnya, terima kasih atas canda tawa, tempat berbagi selama ini.
21. Semua pihak yang belum dapat penulis sertakan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 11 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	7
2.1.1. Teori Keagenan.....	7
2.1.2. Definisi <i>Corporate Governance</i>	9
2.1.3. Manfaat <i>Corporate Governance</i>	10
2.1.4. Struktur <i>Corporate Governance</i>	11
2.1.5. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	16

2.1.6. <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i>	17
2.1.7. Manfaat CGPI.....	18
2.1.8. Proses Pemingkatan Penerapan GCG dalam CGPI.....	19
2.1.9. Faktor Penilaian CGPI.....	20
2.1.10. Koneksi Politik.....	22
2.1.11. <i>Audit Fee</i>	23
2.1.12. Penelitian Terdahulu.....	24
2.1.13. Variabel Kontrol.....	25
2.2. Kerangka Pemikiran.....	29
2.2.1. Hubungan Koneksi Politik dengan <i>Audit Fee</i>	29
2.2.2. Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Audit Fee</i>	30
2.3. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
3.1.1. Variabel Dependen.....	35
3.1.2. Variabel Independen.....	36
3.1.3. Variabel Kontrol.....	37
3.2. Populasi dan Sampel.....	40
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5. Metode Analisis.....	42
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	42
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.3. Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	48

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2. Analisis Data.....	50
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	52
4.2.3. Uji Hipotesis	57
4.3. Intrepetasi Hasil	61
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Simpulan	64
5.2. Keterbatasan.....	65
5.3. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian	48
Tabel 4.2 Perusahaan Sampel	49
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.4 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	54
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Hasil Uji <i>P-Plot of Regression Standardized Residual</i>	53
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Analisis Deskriptif.....	69
LAMPIRAN B Uji Normalitas	71
LAMPIRAN C Uji Multikolonieritas	72
LAMPIRAN D Uji Hipotesis.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit fee merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan. Hingga saat ini belum ada yang mengatur besarnya *audit fee* yang harus diterima auditor dari klien atas jasa audit yang diberikan. Peraturan yang IAI tetapkan hanya menyebutkan ‘besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, pertimbangan professional lainnya’ (Mulyadi, 2002). Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa penetapan *audit fee* dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan oleh salah satu atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan karena tergantung kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien (Suharli dan Nurlaelah, 2008).

Terdapat banyak variasi penentu besarnya *audit fee* yang diterima auditor. Antara lain, dalam penelitian yang dilakukan Michell Suharli dan Nurlaelah (2008) terhadap BUMN di Indonesia menyebutkan bahwa rasio konsentrasi oleh auditor dan ukuran perusahaan auditee berpengaruh secara signifikan terhadap *audit fee* yang diterima auditor.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011a) terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik dan *good corporate governance*

berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau pemiliknya mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah (Gomez dan Jomo, 1999, dalam Wahab, 2011a). Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah ini mempunyai hubungan bisnis yang eksklusif dengan pemerintah dan mempunyai akses istimewa pada setiap kebijakan pemerintah (Gomez dan Jomo, 1999, dalam Wahab, 2011a).

Masih mengenai perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini didapat dari bank pemerintah atau badan pengembangan daerah dan juga untuk mendapatkan tunjangan pensiun (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Selanjutnya Johnson dan Milton (2003) dalam Gul (2006) menyebutkan bahwa kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar ini menyebabkan resiko audit menjadi lebih tinggi sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan.

Penelitian tentang koneksi politik mempengaruhi *audit fee* juga dilakukan oleh Ferdinan A. Gul (2006) yang menggunakan objek negara Malaysia. Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa terjadi peningkatan *audit fee* pada perusahaan yang mempunyai koneksi politik daripada perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik saat terjadi krisis finansial. Perusahaan yang mempunyai koneksi

politik beresiko untuk mengalami kegagalan yang lebih besar. Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan overstatement dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Di dalam penelitian Wahab (2011b) yang lain menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG) sebagai standar pelaksanaan *good corporate governance* di Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel 379 perusahaan *non-financial* dengan kurun waktu penelitian tahun 1999-2002.

Pelaksanaan *good corporate governance* harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Wahab (2011a) di negara Malaysia. Penelitian ini akan meneliti pengaruh koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap *audit fee* Berdasarkan hal tersebut, maka

judul penelitian ini adalah **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT FEE.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian berupa hubungan koneksi politik perusahaan dan penerapan *corporate governance* terhadap *audit fee*, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*?
2. Apakah pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap *audit fee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*.
2. Pengaruh *corporate governance* terhadap *audit fee*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap penentuan *audit fee* pada perusahaan yang mempunyai koneksi politik yang selama ini masih jarang penelitian mengenai hal ini. Selain itu, dapat menambah minat dalam penelitian tentang koneksi politik.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perusahaan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance*. Dengan penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan penjelasan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini.

2.1.1. Teori Keagenan

Di dalam teori keagenan (*agency theory*), yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Luayyi, 2010). Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan dengan melakukan kontrak antara *principal* dan *agent* nya. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak (Nuswandari, 2009).

Pembuatan keputusan oleh manajer dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menimbulkan masalah. Masalah yang timbul bisa berupa informasi yang tidak

lengkap yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak dan, sebagai akibatnya, konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Situasi seperti ini dikenal sebagai asimetri informasi (Hendriksen, 2000).

Hendriksen (2000) menyatakan bahwa permasalahan yang bisa timbul karena asimetri informasi, antara lain:

1. *Moral hazard*, suatu kondisi yang menyatakan aksi-aksi manajer yang mungkin berbeda dari aksi yang disukai pemilik, entah karena manajer mempunyai perangkat preferensi yang berbeda, atau karena manajer sengaja mencoba untuk melalaikan tugas atau menipu pemilik.
2. *Adverse selection*, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi.

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian yang dibuat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal

kepentingan *agent* bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan *principal* (Rizqiasih, 2010).

2.1.2. Definisi *Corporate Governance*

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* menjadi kosakata paling sering dibicarakan di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *corporate governance*, yang diberikan baik oleh perorangan (*individual*) maupun institusi (*institutional*). Menurut Pratolo (2007) *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

Good Corporate Governance yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pengertian lain *corporate governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Arifin (2005), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder

2.1.3. Manfaat Corporate Governance

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Rizqiasih, 2010). Imam Sjahputra (2002) dalam Emirzon (2007) disebutkan bahwa mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi; dalam posisi yang sejajar antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing serta stakeholder yang berkepentingan lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling keterbukaan.
- b. Minimisasi potensi benturan.
- c. Fokus pada strategi-strategi utama.
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- e. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefit*).

- f. Promosi citra perusahaan (*corporate image*).
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan.
- h. Peroleh kepercayaan investor.

2.1.4. Struktur *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*. Berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance*, adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006 dalam Rizqiasih, 2010).

Struktur *governance* didesain sedemikian rupa agar mampu mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali. Dengan kata lain struktur *governance* harus mampu mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pihak-pihak dalam struktur *Good Corporate Governance* dijelaskan dalam subbab berikut:

2.1.4.1. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Penerapan *Corporate governance* secara terstruktur dilaksanakan oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) yang dimaksud dengan dewan

komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan direksi seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 5 di UUPT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

UUPT menyebutkan di pasal 108 ayat dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 menyebutkan bahwa dewan komisaris mempunyai fungsi, antara lain:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau efektifitas praktek *good corporate governance* yang diterapkan BUMN.

Komposisi dewan komisaris ditetapkan paling sedikit 20% merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen yang ditetapkan dalam

keputusan pengangkatannya. Dewan komisaris merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Chandra (2006) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya, Chandra (2006) menyebutkan komite yang dapat dibentuk, antara lain:

1. Komite audit memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Komite Nominasi yang menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
3. Komite Remunerasi yang menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.
4. Komite Asuransi dan Resiko Usaha yang melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.

Mengenai komposisi atau jumlah dewan direksi, dalam pedoman *Good Corporate Governance* tidak dinyatakan secara kuantitatif, jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan

efektifitas dalam pengambilan keputusan. UUPT menyebutkan Dewan direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Tugas dewan direksi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 15-23, yaitu:

1. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal.
3. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan Direksi harus memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai *stakeholders* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengadakan Rapat Direksi harus secara berkala, yaitu sekurangnya sekali sebulan, tergantung dari sifat khusus BUMN.
5. Direksi harus menetapkan tata-tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi di mana tata-tertib tersebut ditetapkan.
6. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.

7. Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.
8. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009).

Keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Amri, 2011).

Berdasar ketentuan BEI tanggal 1 Juli 2000 komposisi komisaris minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK yaitu:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

2. Tidak mempunyai saham emiten atau perusahaan publik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan emitan atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Amri (2011) komisaris independen mempunyai wewenang, yaitu:

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.1.5. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* memerlukan prinsip-prinsip untuk menjalankannya. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang disebutkan Thomas (2006) adalah:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.6. Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) (IICG, n.d). CGPI yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA merupakan program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

Definisi *corporate governance* digunakan untuk menyusun kerangka metodologis CGPI terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEJ. Tujuan program CGPI adalah untuk merangsang perusahaan agar berlomba-

lomba menerapkan *good corporate governance* demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Di samping itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan agar perusahaan termotivasi melaksanakan *corporate governance* dan untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan konsep *good corporate governance* (Nuswandari, 2009).

Sejak tahun 2001 hingga sekarang CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS). Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh *stakeholders* dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya (IICG, n,d).

Pelaksanaan CGPI dari tahun ke tahun selalu dilakukan dengan cara yang berbeda dalam pengembangan metodologi dan alat ukur dalam menilai penerapan GCG. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan keterbatasan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya serta memperjuangkan agar indeks yang disajikan CGPI benar-benar kredibel (Nuswandari, 2009).

2.1.7. Manfaat CGPI

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan setelah mengikuti CGPI adalah sebagai berikut (Rosidah,2010):

1. Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung.
2. Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep GCG yang dilakukan perusahaan.
3. Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan stakeholders terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan.
5. CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
6. Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

2.1.8. Proses Pemeringkatan Penerapan GCG dalam CGPI

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG dapat dijelaskan sebagai berikut (Rosidah, 2010):

1. *Self-assessment*

Pada tahap ini Perusahaan diminta mengisi kuesioner *Self-assessment* seputar penerapan konsep CG di perusahaannya.

2. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan CG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan).

3. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

4. Observasi ke Perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG.

2.1.9. Faktor Penilaian CGPI

CGPI akan menilai faktor-faktor berikut (Rosidah, 2010):

1. Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat.
3. Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggung jawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar.

4. **Responsibilitas** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. **Independensi** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya.
6. **Keadilan** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).
7. **Kompetensi** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif.
8. **Kepemimpinan** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik.
9. **Kemampuan Bekerjasama** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat.
10. **Visi, Misi dan Tata Nilai** yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong

menumbuhkan keinginan dihati para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-pokok tersebut.

11. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG.
12. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan.

2.1.10. Koneksi Politik

Menurut Gomez dan Jomo (dalam Wahab, 2011a) perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Sedangkan, konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo dalam Wahab, 2011a). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan dengan koneksi politik merupakan perusahaan *risk taker*. perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan

pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006).

Selanjutnya Johnson dan Milton (2003) dalam Gul (2006) menyebutkan bahwa kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar ini menyebabkan resiko audit menjadi lebih tinggi sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan. Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan *overstatement* dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

2.1.11. Audit Fee

Iskak dalam Suharli (2008) mendefinisikan *audit fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Menurut surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor KEP.24/I-API/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Menurut Suharli dan Nurlaelah (2008) ukuran perusahaan, rasio konsentrasi perusahaan mempunyai pengaruh dalam penentuan besarnya *audit fee*. Namun,

dalam penelitian Ghosh (2010) *audit fee* dipengaruhi oleh perusahaan yang besar dengan banyak grup afiliasi, tingginya masalah likuiditas perusahaan, dan perusahaan yang merupakan perusahaan daerah akan membayar *audit fee* nya lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jubb (1996) menyatakan bahwa besar *audit fee* dipengaruhi oleh resiko bisnis dan resiko audit. Kedua resiko tersebut dapat dihindari dengan usaha auditor yang lebih keras, sehingga *audit fee* yang dibayarkan akan lebih tinggi.

2.1.12. Penelitian Terdahulu

Wahab (2011a) menguji antara perusahaan yang mempunyai koneksi politik berpengaruh signifikan dan positif pada *audit fee* yang dibayarkan. Diketahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang *risk taker*. Penelitian yang dilakukan di Malaysia ini, juga menyebutkan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut mengambil sampel 382 perusahaan non keuangan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2001-2003.

Wahab (2011b) menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan *Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG)* sebagai standar pelaksanaan *good corporate governance* di Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel 379 perusahaan non-keuangan dengan kurun waktu penelitian tahun 1999-2002.

Penelitian yang dilakukan Gul (2006) menunjukkan adanya peningkatan biaya audit pada perusahaan pemerintah yang relatif lebih besar saat krisis keuangan karena auditor pada kondisi tersebut lebih banyak melakukan usaha

audit. Penelitian ini menggunakan sampel 812 perusahaan non-keuangan dengan kurun waktu penelitian tahun 1996, 1997, 1998.

2.1.13. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol agar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya sehingga ada penyesuaian dalam variabel kontrol.

Variabel kontrol yang dalam penelitian sebelumnya antara lain:

2.1.13.1. Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian sebelumnya ukuran perusahaan diproksikan menggunakan total aset. Semakin besar jumlah aset maka ukuran perusahaan semakin besar. Suminic berpendapat (dalam Wahab, 2011a) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka audit yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga *audit fee* yang dibayarkan akan semakin tinggi.

2.1.13.2. Anak Perusahaan

Subsidiary disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Suharli (2008) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah anak perusahaan sehingga penetapan biaya audit akan semakin besar.

2.1.13.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi terhadap jumlah saham yang beredar. Brickley, Lease, dan Clifford dalam Wahab (2011b) berpendapat bahwa adanya investor institusional dalam perusahaan akan

menaikkan tingkat pengawasan dan perusahaan tersebut akan meminta audit yang lebih seksama pada auditor.

2.1.13.4. Kempemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Lennox (2005) menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial menjadikan pengawasan menurun sehingga *agency cost* tidak mengalami kenaikan maka *audit fee* akan menjadi rendah.

2.1.13.5. Rasio Aset Lancar atas Total Aset

Rasio aset lancar atas total aset untuk mengontrol *inherent risk*. Suminic dalam Wahab (2011a) berpendapat bahwa ada hubungan positif antara rasio aset lancar atas total aset dan *audit fee* karena audit bagian aset membutuhkan prosedur audit tertentu sehingga mempunyai resiko yang tinggi.

Pengukuran rasio aset lancar atas total aset tidak bisa digunakan dalam penelitian karena sampel penelitian ini terdapat perusahaan keuangan yang mana dalam perusahaan keuangan tidak terdapat akun aset lancar.

2.1.13.6. Return on Asset

Return on asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis (Kabo, 2011).

Suatu perusahaan dengan nilai ROA yang rendah akan meminta prosedur audit yang seksama dan tanggung jawab auditor mengalami tekanan lebih dalam hal tersebut (Wahab, 2011b) sehingga *audit fee* akan mengalami kenaikan.

2.1.13.7. Kerugian

Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi insidental suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode diluar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik (Ghozali, 2007).

2.1.13.8. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya (Wikipedia). Likuiditas termasuk kontrol modal kerja yang diukur menggunakan rasio aset lancar atas kewajiban lancar (Wahab, 2011b).

Pengukuran rasio aset lancar atas total aset tidak bisa digunakan dalam penelitian karena sampel penelitian ini terdapat perusahaan keuangan yang mana dalam perusahaan keuangan tidak terdapat akun aset lancar.

2.1.13.9. Rasio Utang atas Ekuitas Perusahaan

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Helmi, 2009).

2.1.13.10. Altman z

Rumus *Z-score* diterbitkan oleh Edward I. Altman. Rumus ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan bahwa perusahaan akan masuk kebangkrutan dalam waktu dua tahun. Z-skor adalah kombinasi linear dari empat atau lima rasio bisnis umum, dihitung dengan koefisien. Koefisien diperkirakan dengan mengidentifikasi serangkaian perusahaan yang telah menyatakan kebangkrutan dan kemudian mengumpulkan sampel cocok dari perusahaan yang telah selamat, dengan pencocokan oleh industri dan ukuran perkiraan (aset) (Wikipedia).

Rumus *Z-score* adalah sebagai berikut (Wahab, 2011a):

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5,$$

Keterangan:

$X_1 = \text{working capital/total assets.}$

$X_2 = \text{retained earnings/total assets.}$

$X_3 = \text{earnings before interest taxes and interest/total assets.}$

$X_4 = \text{market value of equity/total liabilities.}$

$X_5 = \text{net sales/total assets.}$

Namun formula *Z-Score* tersebut tidak dapat diterapkan pada semua industri (Parahita, 2011), termasuk industri keuangan atau perbankan. Karena itu, variabel ini tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

2.1.13.11. Kantor Akuntan Publik

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.”

Kantor akuntan publik yang mempunyai nama besar (Big 4) akan memberikan kualitas audit yang tinggi daripada kantor akuntan publik yang tidak mempunyai nama besar (DeAngelo dalam Pop, n.d) sehingga perusahaan akan membayar *audit fee* lebih tinggi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang hubungan variabel dependen dengan variabel independennya.

2.2.1. Hubungan Koneksi Politik dengan Audit Fee

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan yang *risk taker* sehingga kemungkinan mengalami kegagalan sangat besar (Wahab, 2011a). Perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a).

Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan overstatement dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Tingkat kegagalan yang tinggi tersebut mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh auditor mejadi tinggi sehingga auditor menetapkan feenya berdasarkan resiko yang akan diterima. Asumsi bahwa semakin besar resiko yang diterima auditor maka fee yang diterima akan semakin tinggi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2011a) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gul (2006) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Indikator koneksi politik dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh kondisi etnis di negara Malaysia.

2.2.2. Hubungan Good Corporate Governance terhadap Audit Fee

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

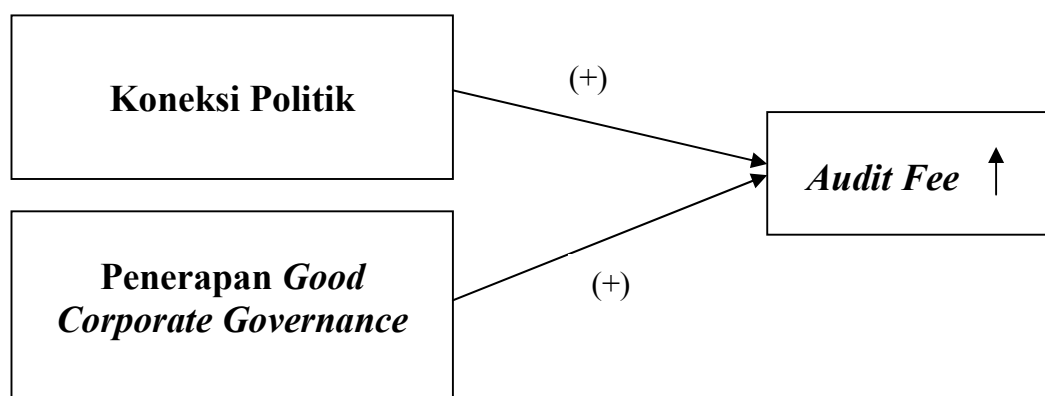
Penerapan GCG berguna untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena itu perusahaan harus berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham

minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a).

Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan *good corporate governance*. *The Indonesian Insitute for Corporate Governance* (IICG) melakukan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebut dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011a) menggunakan indikator indeks MCCG untuk mengukur pengaruh GCG terhadap *audit fee*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan Wahab (2011b) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.3. Hipotesis

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan yang *risk taker* sehingga kemungkinan mengalami kegagalan sangat besar (Wahab, 2011a). Perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a).

Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan *overstatement* dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Tingkat kegagalan yang tinggi tersebut mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh auditor mejadi tinggi sehingga auditor menetapkan feenya berdasarkan resiko yang akan diterima. Asumsi bahwa semakin besar resiko yang diterima auditor maka fee yang diterima akan semakin tinggi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2011a) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gul (2006) yang berjudul menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*.

Berdasarkan pemaparan argumen tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H_1 = perusahaan yang mempunyai koneksi politik membayar *audit fee* lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Penerapan GCG berguna untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena itu perusahaan harus berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a).

Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan *good corporate governance*. *The Indonesian Insitute for Corporate Governance* (IICG) melakukan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebut dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011a) menggunakan indikator indeks MCCG untuk mengukur pengaruh GCG terhadap *audit fee*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan Wahab (2011b) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*.

Berdasarkan pemaparan argumen tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂ = perusahaan dengan *good corporate governance* membayar *audit fee* lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance*

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah sesuatu yang bernilai beda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2003). Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu *audit fee* sebagai variabel dependen, koneksi politik dan penerapan *good corporate governance* sebagai variabel independen, dan ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ROA, kerugian, rasio utang atas ekuitas serta kantor akuntan publik sebagai variabel kontrol.

Definisi operasional adalah menjelaskan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan cara melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep (Sekaran, 2003).

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit fee*. *Audit fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Data tentang *audit fee* akan diambil dari akun *professional fees* yang terdapat pada laporan

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan AF.

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Koneksi Politik

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal, angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Identifikasi perusahaan dengan melihat susunan modal saham yang tercantum dalam laporan keuangan. Variabel ini akan disimbolkan dengan KPOL.

Kriteria koneksi politik:

1. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pemilik perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol.
3. Pemilik perusahaan merupakan pejabat pemerintah.

3.1.2.2. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Variabel ini diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dikeluarkan IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) yang dipublikasikan melalui majalah SWA. Variabel ini menggunakan skala

rating yaitu memberikan skor berupa angka mulai 0-100. Peringkat sudah diberikan oleh IICG berupa peringkat perusahaan sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.. Variabel ini akan disimbolkan dengan GCGIN.

3.1.3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol agar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

3.1.3.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diindikasikan dengan melihat jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah aset yang termasuk adalah aset lancar, aset tetap dan aset tak berwujud. Variabel ini akan diukur menggunakan total asset perusahaan. Variabel ini akan dilambangkan dengan ASSET di dalam persamaan.

3.1.3.2. Anak Perusahaan

Subsidiary disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Anak perusahaan yang masuk dalam hitungan adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung. Selanjutnya variabel ini dilambangkan dengan SUBS.

3.1.3.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusional perusahaan seperti bank, dana pensiun, lembaga asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persen (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham

yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Pengukuran tersebut akan dilambangkan dengan INSTOWN.

3.1.3.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan manajerial perusahaan (jumlah kepemilikan saham oleh komisaris dan direktur) terhadap total saham yang beredar. Pengukuran ini dilambangkan dengan MANOWN.

3.1.3.5. Return on Asset

Wahab (2011a) menambahkan ROA sebagai proxy profitabilitas yang diharapkan mempunyai hubungan negatif. Nilai ROA perusahaan yang rendah akan membutuhkan usaha audit yang besar dan kewajiban auditor lebih mendapatkan perhatian. Selanjutnya variabel ini dilambangkan dengan ROA.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{pendapatan operasional setelah pajak}}{\text{total asset}}$$

Pengertian:

- Pendapatan merupakan laba usaha perusahaan yang diperoleh dari transaksi utama perusahaan.
- Total aset merupakan seluruh jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Termasuk aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud.

3.1.3.6. Kerugian

Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi insidental suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode diluar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik (Ghozali, 2007).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal, angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian ditahun sebelumnya dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan tidak mengalami kerugian ditahun sebelumnya. Variabel ini akan disimbolkan dengan LOSS.

3.1.3.7. Rasio Utang atas Ekuitas Perusahaan

Variabel ini merupakan rasio untuk mengukur solvabilitas seluruh utang perusahaan atas seluruh ekuitas perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan DER dalam persamaan.

Rumus:

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

Pengertian:

- Total utang merupakan seluruh jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Termasuk utang lancar dan utang tidak lancar.
- Total ekuitas merupakan seluruh jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan.

3.1.3.8. Kantor Akuntan Publik

Pemakaian kantor akuntan terpercaya dapat mempengaruhi pemberian audit fee. Kantor akuntan publik yang mempunyai kredibilitas tergabung dalam *The Big 4*. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam *The Big 4* adalah :

- KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
- KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
- KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).
- KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal, angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan KAP big4 di perusahaan dan angka 0 untuk mengindikasikan tidak menggunakan KAP big4 di perusahaan. Variabel ini akan disimbolkan dengan KAP.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survey CGPI yang dilaksanakan IICG pada tahun 2007-2011. Penentuan perusahaan yang menjadi sampel berdasarkan kriteria tertentu (*purpose sampling*) yang bertujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Perusahaan yang termasuk dalam pelaksanaan survey CGPI yang dilaksanakan IICG tahun 2007-2011.
2. Mencantumkan *professional fee* pada laporan keuangan perusahaan yang berdenominasi rupiah.
3. Perusahaan *listed* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2011.
4. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data sekunder ini diambil dari laporan tahunan yang diambil dari Pusat Informasi Pasar Modal Semarang, majalah SWA sebagai media publikasi dari IICG dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Alasan penggunaan data sekunder adalah:

1. Laporan keuangan yang sudah *publish* telah diaudit oleh akuntan publik sehingga informasinya dapat dipercaya.
2. Survei yang dilakukan IICG telah dipublikasikan di majalah SWA dan website IICG.
3. Lebih mudah dan lebih murah dalam memperoleh data.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dari sumber data yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan pencatatan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan perekapan kemudian perhitungan.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (koneksi politik, *Good Corporate Governance*, dan *audit fee*) yang dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata, kisaran, dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan uji statistik dengan cara uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan analisis grafik:

- (i) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- (ii) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah nilai signifikan pada perhitungan tersebut diatas ambang normal yaitu 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas adalah dengan memperhatikan :

1. Besaran korelasi antar variabel independen

Pedoman suatu model regresi bebas multikolonieritas jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas..

2. Nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*)

Persamaan yang digunakan adalah :

$$VIF = \frac{1}{tolerance}$$

Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menunjukkan adanya faktor-faktor multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan berbagai cara, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- i) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
- ii) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan *Run Test* untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

Dasar pengambilan keputusan tidak terjadi autokorelasi adalah nilai signifikan pada hasil perhitungan lebih dari 0,05.

3.5.3. Pengujian Hipotesis

3.5.3.1. Uji Model

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara *audit fee* dengan variabel-variabel independen.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$AF = b_0 + b_1 (KPOL) + b_2 (GCGIN) + b_3 (ASSETS) + b_4 (SUBS) + b_5 (INSTOWN) + b_6 (MANOWN) + b_7 (ROA) + b_8 (LOSS) + b_9 (DER) + b_{10} (KAP) + e$$

Dimana :

AF = *audit fee*

KPOL = koneksi politik

GCGIN = indeks *Good Corporate Governance*

ASSETS = total aktiva

SUBS = jumlah anak perusahaan

INSTOWN = kepemilikan institusional

MANOWN = kepemilikan manajerial

ROA = *return on asset*

LOSS = kerugian

DER = rasio utang atas ekuitas perusahaan

KAP = auditor Big 4

Uji model dilakukan untuk menguji apakah model regresi merupakan model yang baik. Uji model dilakukan dengan uji simultan F lalu koefisien determinasi.

Uji simultan F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

Pengujian Simultan F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel KPOL, GCGIN, ASSETS, SUBS, INSTOWN, MANOWN, ROA, LOSS, DER dan KAP berpengaruh terhadap *audit fee*.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel KPOL, GCGIN, ASSETS, SUBS, INSTOWN, MANOWN, ROA, LOSS, DER dan KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Setelah dilakukan uji simultan F, dilakukan pengujian koefisien determinasi. Pengujian determinasi atau R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.3.2. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2011). Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara *partial* variabel ukuran KPOL, GCGIN, ASSETS, SUBS, INSTOWN, MANOWN, ROA, LOSS, DER dan KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Dalam Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien atau beta yang menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta dapat dilihat pula pengaruh positif atau negatif berdasarkan tanda positif atau negatif pada koefisien.